



**SAMBUTAN
BUPATI KAPUAS HULU
PADA PEMBUKAAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

JUM'AT, 18 MARET 2022

YANG KAMI HORMATI, WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT,

YTH. ANGGOTA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN BARAT;

YTH. PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ATAU
YANG MEWAKILI;

YTH. KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS
HULU;

YTH. REKAN-REKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU;

YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU;

YTH. PARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
PERANGKAT DAERAH, CAMAT DAN
KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU;

YTH. PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU;

YTH. PIMPINAN PERBANKAN DAN BUMD
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU;

YTH. PARA KETUA ORGANISASI POLITIK,
ORMAS, ORGANISASI PROFESI, LSM,
REKAN-REKAN MEDIA CETAK MAUPUN
ELEKTRONIK;

YTH. PARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.

**ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH,**

SHALOM, OM SWASTYASTU,

NAMO BUDDHAYA, SALAM KEBAJIKAN.

**ADIL KA'TALINO BACURAMIN KA'SARUGA
BASENGAT KA'JUBATA**

**SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA
UNTUK KITA SEMUA,**

MENGAWALI SAMBUTAN INI, SAYA INGIN MENGAJAK KITA SEMUA YANG HADIR DI TEMPAT INI UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA SEHINGGA PADA KESEMPATAN INI KITA MASIH DIBERIKAN KEKUATAN, KESEMPATAN DAN KESEHATAN UNTUK BERSAMA-SAMA MENGIKUTI ACARA PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ATAU (RKPD) TAHUN 2023,

KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR-BESARNYA ATAS KESEDIAAN BAPAK DRS. H. RIA NORSAN, M.M.,M.H. WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

YANG TELAH BERKENAN HADIR PADA MUSRENBANG KABUPATEN KAPUAS HULU, HARI INI.

HADIRIN PARA UNDANGAN DAN PESERTA MUSRENBANG YANG BERBAHAGIA,

MUSRENBANG KABUPATEN KAPUAS HULU YANG KITA LAKSANAKAN PADA HARI INI MERUPAKAN SALAH SATU TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

MUSRENBANG KABUPATEN MERUPAKAN FORUM MUSYAWARAH ANTAR PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MENYERAP BERBAGAI ASPIRASI SECARA BERJENJANG DI SETIAP TINGKATAN PEMERINTAHAN UNTUK DITUANGKAN DALAM SUATU DOKUMEN PERENCANAAN.

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KABUPATEN INI MERUPAKAN KELANJUTAN DARI TAHAPAN PROSES PERENCANAAN SEBELUMNYA YAITU MUSRENBANG TINGKAT DESA PADA BULAN JANUARI 2022, KONSULTASI PUBLIK PADA BULAN FEBRUARI 2022, MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN PADA AWAL BULAN MARET 2022 DAN FORUM PERANGKAT DAERAH PADA TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 17 MARET 2022, YANG MENGHASILKAN KESEPAKATAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA TAHUN 2023.

KESEPAKATAN TERSEBUT MERUPAKAN SALAH SATU INSTRUMEN PENTING DALAM MENGHASILKAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 - 2026 DAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT SERTA RKP PEMERINTAH PUSAT .

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

FORUM MUSRENBANG INI MEMPUNYAI ARTI YANG SANGAT PENTING, SEBAB MELALUI FORUM INI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN DAPAT MELAKUKAN PENAJAMAN, PENYELARASAN, DAN KLARIFIKASI SEHINGGA TERCAPAI KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN RKPD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 YANG DISUSUN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

RKPD MEMPUNYAI KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI YANG SANGAT STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, SEBAGAIMANA KETENTUAN DALAM PASAL 263 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIMANA DISEBUTKAN BAHWA RKPD MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJMD YANG MEMUAT RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN. DENGAN DEMIKIAN, DOKUMEN RKPD HARUS MEMILIKI KETERKAITAN YANG SANGAT ERAT DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) DAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) UNTUK MENJAMIN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DIRENCANAKAN BAIK SELAMA 20 TAHUNAN MAUPUN 5 TAHUNAN.

HADIRIN PARA UNDANGAN DAN PESERTA MUSRENBANG YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAIMANA YANG KITA PAHAMI BERSAMA BAHWA RKPD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 YANG MENJADI HASIL AKHIR DARI MUSRENBANG KABUPATEN YANG KITA LAKSANAKAN PADA HARI INI AKAN MENJADI ACUAN ATAU PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN ANGGARAN 2023 SERTA PENYUSUNAN ANGGARAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2023, SEHINGGA UNTUK MENJAMIN KONSISTENSI DAN SINKRONISASI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, SAYA AKAN MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN KITA SEMUA, SEBAGAI BERKUT:

1. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN RKPD HARUS SESUAI DENGAN TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA AMANAT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 DAN PERATURAN – PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA;
2. PENJABARAN RPJMD KE DALAM RKPD TAHUN 2023 DAN PENGANGGARAN DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2023 HARUS KONSISTEN, UNTUK MENDORONG TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERTANGGUNGJAWAB SERTA TERPENUHINYA JANJI POLITIK KAMI YANG TELAH DITUANGKAN DALAM VISI **TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HEBAT (HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL)**;

3. PERENCANAAN DAN **PENGANGGARAN** UNTUK TAHUN 2023 JUGA HARUS **SUDAH** MELALUI **APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) KEMENDAGRI**;
4. AGAR SEMUA PERANGKAT DAERAH MELAKUKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH, MELIPUTI 3 (TIGA) ASPEK YAITU **KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI HASIL** SECARA TEPAT WAKTU, SERTA MELAKUKAN PELAPORAN TERHADAP HASIL EVALUASI DIMAKSUD;
5. MEMBANGUN DAN MENJAGA KOMUNIKASI YANG HARMONIS ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF AGAR MEMILIKI PEMAHAMAN DAN PERSEPSI YANG SAMA DAN HOLISTIK TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.

HADIRIN YANG TERHORMAT,
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BERKOMITMEN UNTUK TERUS MENINGKATKAN KUALITAS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026, DENGAN MENETAPKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENENTUKAN TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SETIAP TAHUNNYA UNTUK MENCAPAI SASARAN RPJMD SECARA BERTAHAP.

SEJALAN DENGAN TEMA PEMBANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD DAN AKAN DIJABARKAN DALAM RKPD TAHUN 2023, MAKA TEMA YANG DIANGKAT PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2022 ADALAH **“PENINGKATAN KUALITAS PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR”** DENGAN FOKUS PRIORITAS SEBAGAI BERIKUT :

1. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN;
2. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR;
3. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP;

HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

MENGINGAT PERAN STRATEGIS MUSRENBANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022 DALAM PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023, MAKA PADA KESEMPATAN INI SAYA BERHARAP KEPADA SELURUH PESERTA MUSRENBANG UNTUK DAPAT MEMBERI SARAN DAN MASUKAN YANG KONSTRUKTIF

AGAR RKPd YANG DIHASILKAN DARI MUSRENBANG INI DAPAT SELARAS DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026 SERTA SELARAS DENGAN PRIORITAS NASIONAL MAUPUN PROVINSI.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA, MEMBERIKAN RIDHO ATAS SEGALA UPAYA KITA DALAM MEMBANGUN KABUPATEN KAPUAS HULU YANG KITA CINTAI INI.

DENGAN MENGUCAPKAN **PUJI TUHAN YANG MAHA ESA**, MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022 UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SECARA RESMI SAYA NYATAKAN **DIBUKA**.

SELANJUTNYA SAYA MOHON **KEPADA BAPAK WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT** UNTUK BERKENAN MEMBERIKAN **SAMBUTAN** DAN ARAHAN PADA KEGIATAN MUSRENBANG INI.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH OM

**SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA
UNTUK KITA SEMUA**

BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN, S.H.



**SAMBUTAN BUPATI KAPUAS HULU
FORUM KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023**

KAMIS, 16 FEBRUARI 2023

- YTH. : KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU;**
- YTH. : REKAN - REKAN UNSUR FORKOMPINDA KABUPATEN KAPUAS HULU;**
- YTH. : ASISTEN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH**
- YTH. : PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH, DAN PARA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.**
- YTH. : PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**
- YTH. : PIMPINAN PERBANKAN DAN BUMD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**

KAPUAS HULU;

- YTH. : PARA KETUA ORGANISASI POLITIK, ORMAS, OKP, NGO, ORGANISASI PROFESI, LSM, REKAN-REKAN MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK**
- YTH. : PARA UNDANGAN, HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.**

***ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH,
SHALOM, OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN.
ADIL KA'TALINO BACURAMIN KA'SARUGA
BASENGAT KA'JUBATA***

***SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK
KITA SEMUA***

**PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN
PUJI SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA
ESA KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN
HIDAYAH-NYA,**

SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGIKUTI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024 GUNA MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN DALAM PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2024, YANG MERUPAKAN TAHAPAN PENTING DAN STRATEGIS DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU DAN MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI AMANAT UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

TAK LUPA UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG TINGGI, KAMI SAMPAIKAN KEPADA PARA PESERTA FORUM

KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024 ATAS KEIKUTSERTAANNYA, JUGA KEPADA PANITIA PELAKSANA ATAS TERSELENGGARANYA KEGIATAN INI.

BAPAK, IBU SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA;

PERLU KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD ADALAH WADAH BERSAMA ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN UNTUK MELAKUKAN PENAJAMAN, PENYELARASAN, KLARIFIKASI DAN PENYEPAKATAN TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI BAHAN UNTUK MENYEMPURNAKAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) YANG DIINTEGRASIKAN

DENGAN PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU PRIODE 2021 - 2026, YAITU “**TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL**”

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI BUPATI 2021 - 2026 MAKA TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 ADALAH “**PENGEMBANGAN KAPASITAS DESA MENUJU PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**” TEMA TERSEBUT MERUPAKAN TEMA PEMBANGUNAN DI TAHUN 2024 ATAU TAHUN KETIGA PEMBANGUNAN BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 - 2026. SETELAH DI TAHUN SEBELUMNYA DILAKUKAN PERCEPATAN

PEMULIHAN DAN PENINGKATAN KULITAS PEREKONOMIAN, DI TAHUN KETIGA INI PEMERINTAHAN DESA MERUPAKAN UJUNG TOMBAK DALAM PEMBANGUNAN DI DESA. DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN, PEMERINTAH DESA HARUS MEMAHAMI KONDISI DESANYA TERUTAMA TERKAIT PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG DIPIMPINNYA, MULAI DARI KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, KEBUTUHAN AIR MINUM, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN SARANA PRASARANA LAINNYA. PEMERINTAH DESA SUDAH DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI SALAH SATUNYA DENGAN MEMBINA DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA SERTA

MENGINTEGRASIKANNYA AGAR MENCAPAI PEREKONOMIAN SKALA PRODUKTIF UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN MASYARAKAT DESA. DIHARAPKAN DI TAHUN 2024 BANYAK DESA DENGAN STATUS DESA MANDIRI DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

YANG BERFOKUS PADA :

- ✓ 1. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN;
- ✓ 2. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR ;
- ✓ 3. PENINGKATAN JUMLAH DESA MANDIRI;
- ✓ 4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

TERKAIT DENGAN PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2021 -

2026, FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU HARUSLAH MENJADI PERHATIAN SECARA KHUSUS DARI KITA SEMUA.

KARENA PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI BUPATI TAHUN 2021 - 2026 DAN FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH DI TETAPKAN TENTUNYA DAPAT DI CAPAI APABILA SEMUA PERANGKAT DAERAH SERIUS MELAKUKAN SINKRONISASI, DAN SINERGISITAS TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH YANG TELAH DI TETAPKAN SEHINGA TIDAK BERJALAN SENDIRI - SENDIRI. ✓

**HADIRIN PESERTA FORUM KONSULTASI
PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD YANG
BERBAHAGIA;**

SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, SEKALI
LAGI SAYA TEKANKAN KEPADA SEMUA
PERANGKAT DAERAH AGAR PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK INI HARUSLAH
MEMPERHATIKAN MASUKAN DARI SEMUA
STAKEHOLDER, SEHINGGA KINERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN BERJALAN, DAN RANCANGAN
AWAL RKPD TA 2024 SESUAI DENGAN
HARAPAN KITA SEMUA. →

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, *diawali dengan*
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
SECARA RESMI DIBUKA.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA
SAMPAIKAN.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA
MEMBERIKAN PETUNJUK DAN RAHMATNYA
KEPADA KITA SEMUA.

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH
ADIL KA'TALINO BACURAMIN KA'SARUGA
BASENGAT KA'JUBATA.
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK
KITA SEMUA**

**BUPATI KAPUAS HULU,
FRANSISKUS DIAAN, S.H.**

SAMBUTAN
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU
PADA MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023
PENYUSUNAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2024

- YTH : BAPAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
DAN REKAN-REKAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN;
- YTH : PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SERTA PARA
KEPALA INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN KAPUAS HULU ATAU
YANG MEWAKILI;
- YTH : PARA STAKEHOLDER KABUPATEN KAPUAS HULU, KEPALA
DESA, ORMAS, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH
PEMUDA, NGO/LSM, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

***ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SHALOM, OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM KEBAJIKAN.
ADIL KA'TALINO BACURAMIN KA'SARUGA BASENGAT KA'JUBATA***

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT
TUHAN YANG MAHA ESA YANG SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN
KARUNIANYA, SEHINGGA KITA SELALU BERADA DALAM KEADAAN SEHAT
WAL'AFIAT DAN DIBERI KESEMPATAN BERTEMU DI RUANGAN INI UNTUK
BERSAMA-SAMA MENGIKUTI ACARA MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN.

KAMI SELAKU KOORDINATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU MENYAMBUT BAIK ACARA MUSRENBANG
TINGKAT KECAMATAN PADA TAHUN INI YANG DIJADWALKAN SETIAP
TAHUNNYA, DENGAN AGENDA PERANKINGAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN
2024.

PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN YANG SAYA HORMATI,

PELAKSANAAN MUSRENBANG SETIAP TAHUNNYA DIDASARKAN PADA UU
NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL YANG DISUSUN SECARA HIRARKIS MULAI DARI PUSAT SAMPAI DI
TINGKAT KECAMATAN DAN DESA.

SECARA KONSEPTUAL UNDANG-UNDANG INI MENCOBA MENGGABUNGKAN ANTARA PENDEKATAN SEBELUMNYA *TOP DOWN PLANNING* DENGAN *BOTTOM UP PLANNING*, YANG DIHARAPKAN AKAN MAMPU MEMBAWA BERBAGAI PERUBAHAN MENDASAR PADA EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERUTAMA DI DAERAH YANG JAUH DARI PUSAT IBUKOTA DAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI.

UNTUK MEWUJUDKAN HAL INI DILAKUKAN ACARA MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN PADA HARI INI DENGAN MEMPERTEMUKAN SELURUH STAKEHOLDER KECAMATAN DAN DESA DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN INI, GUNA MEMBAHAS APA SAJA YANG TERBAIK BAGI DESA-DESA DI KECAMATAN INI DENGAN MENENTUKAN PERANKINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TELAH SESUAI DENGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 YANG TELAH DI TETAPKAN DAN HASIL PERANGKINGAN PROGRAM/KEGITAN PRIORITAS KITA SEPAKATI BERSAMA DALAM BERITA ACARA MUSRENBANG KECAMATAN INI NANTI AKAN DI JADIKAN SEBAGAI BAHAN DALAM PEMBAHASAN FORUM PERANGKAT DAERAH YANG RENCANANYA AKAN DI LAKSANAKAN PADA HARI SENIN TANGGAL 27 DAN HARI SELASA 28 FEBRUARI 2023 DI LANJUTKAN DENGAN MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN PADA HARI RABU TANGGAL 1 MARET TAHUN 2023.

SATU YANG PERLU KAMI INGATKAN BAHWA KETERBATASAN DANA YANG ADA DALAM APBD KITA DAN ADANYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.07/2022 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023. DIMANA BERDASARKAN PMK TERSEBUT DI PERUNTUKAN UNTUK PENGGAJIAN FORMASI P3K SEBESAR RP. 35.343.414.000 , PENDANAAN KELURAHAN SEBESAR RP. 800.000.000 , BIDANG PENDIDIKAN SEBESAR RP. 140.686.661.000, BIDANG KESEHATAN SEBESAR RP. 46.600.713.000 , DAN BIDANG PEKERJAAN UMUM SEBESAR RP. 60.874.974.000 MENGHARUSKAN KITA UNTUK BERFIKIR RASIONAL DAN CERMAT DALAM MENENTUKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS. DI KARENAKAN ADANYA PMK TERSEBUT MEMAKSA KITA MELAKUKAN PENYEMPURNAAN TERHADAP APBD TAHUN ANGGARAN 2023 SEHINGGA ALOKASI KEGIATAN APBD YANG BIASANYA KITA SAMPAIKAN SAAT MUSRENBANG INI BELUM DAPAT KAMI SAMPAIKAN PADA SAAT MUSRENBANG KECAMATAN INI. UNTUK USULAN KEGIATAN YANG DI AKOMODIR DI TAHUN 2023 INI SETELAH TAHAPAN PENYEMPURNAAN ATAU PENYESUAIAN TERHADAP PMK NOMOR 212 TAHUN 2022 DAPAT DI LAKUKAN PERGANTIAN/PERUBAHAN USULAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG DESA.

PESERTA MUSRENBANG YANG SAYA HORMATI,

SESUAI DENGAN KEBIJAKAN UMUM RPJMD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 – 2026 TAHUN KETIGA MAKA TEMA PRIORITAS PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 ADALAH “ **PENGEMBANGAN KAPASITAS DESA MENUJU PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** “ DENGAN PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU PADA TAHUN 2024 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DENGAN ARAH KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT :
 - OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES), USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM), INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, KREDIT USAHA RAKYAT (KUR), PASAR TRADISIONAL, PARIWISATA BERBASIS POTENSI LOKAL, TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT;
 - PEMBINAAN TERHADAP KOPERASI, PELAKU USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, MEMBERI BANTUAN MODAL DAN KEMUDAHAN DALAM DUNIA USAHA;
 - MENINGKATKAN INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA TERHADAP PROSES PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN DAERAH;
 - OPTIMALISASI EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, DAN DIVERSIFIKASI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN;
 - PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN PUSAT PELATIHAN, PEMBINAAN DI SEKTOR PERKEBUNAN, PERIKANAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, SERTA BANTUAN BIBIT DAN BENIH;
 - GERAKAN MASYARAKAT MENANAM TANAMAN PRODUKTIF;
 - MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP YANG DIARAHKAN KEPADA PENINGKATAN PRODUKSI BUDIDAYA SISTEM CBF;
 - MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA YANG DIARAHKAN KEPADA KEMAMPUAN POKDAKAN UNTUK MEMPRODUKSI PAKAN ALAMI DAN BIBIT SECARA MANDIRI;
 - DIARAHKAN KEPADA KAWASAN - KAWASAN YANG POTENSIAL SEBAGAI SUMBER DAYA IKAN YANG TELAH MEMILIKI JARINGAN JALAN YANG TERKONEKSI KEPADA PUSAT-PUSAT PEMASARAN;
 - MENGEMBANGKAN KAWASAN DESA WISATA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA ALAM, PROMOSI PARIWISATA, MELIBATKAN MASYARAKAT LOKAL.
2. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR DENGAN ARAH KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT :
 - PENGELOLAAN PENDIDIKAN;
 - PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT;

- PENATAAN BANGUNAN GEDUNG;
- PENYELENGGARAAN JALAN;
- PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM;
- PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH;
- PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA);
- PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN;

3. PENINGKATAN DESA MANDIRI.

- PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS IDM;

4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- OPTIMALISASI SOSIAL SAFETY NET (JARINGAN PENGAMAN SOSIAL),
- MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN, PEMBERIAN AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN, MENGEMBANGKAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEMITRAAN, PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DESA.
- PERLIBATAN KELOMPOK PEREMPUAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN BIDANG USAHA. PENGUATAN ADVOKASI DAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU, PENGUATAN INFORMASI KELUARGA BERENCANA DAN KONSELING UNTUK KELOMPOK MUDA, PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN KELUARGA BERENCANA (DATA, INFORMASI). PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
- PENGUATAN KAPASITAS PELEMBAGAAN, PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) SERTA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
- PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK, PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL, PEMBINAAN, PELATIHAN, PERMODALAN DAN JAMINAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL. PENGUATAN ORGANISASI PEREMPUAN DARI SEMUA TINGKATAN DARI HULU KE HILIR.

DEMIKIANLAH SAMBUTAN INI KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI PENGANTAR PADA ACARA MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN INI. SEBAGAI MANUSIA BIASA YANG TIDAK SEMPURNA TENTUNYA TIDAK LUPUT DARI KELEMAHAN DAN KETERBATASAN. NAMUN DENGAN SEGALA KERENDAHAN DAN KETULUSAN HATI KAMI TELAH BERUSAHA SEMAKSIMAL MUNGKIN MEMBANGUN KOMITMEN DAN MENGERAHKAN KEMAMPUAN MANAJERIAL UNTUK

MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA YANG ADA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

**WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
ADIL KA'TALINO BACURAMIN KA'SARUGA BASENGAT KA'JUBATA.
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA**

**20 FEBRUARI 2023
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
KAPUAS HULU,**

AMBROSIUS SADAU, S.H.,M.SI.

CAPAIAN KINERJA BAPPEDA

TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2023

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN :

Meningkatkan kualitas Perencanaan dan pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah

SASARAN :

1. Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah;
4. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan.



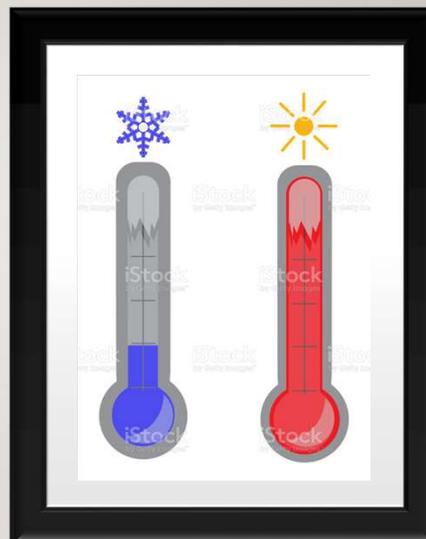
INDIKATOR TUJUAN :

1. NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNSUR PERENCANAAN KINERJA;
TARGET : 25

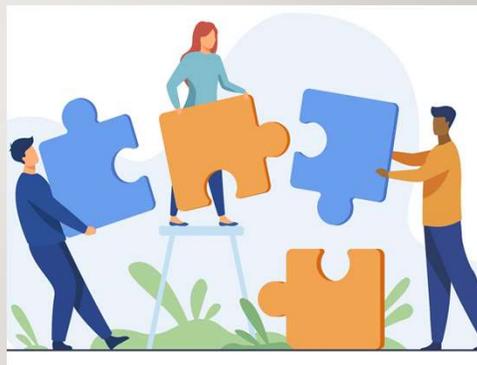
2. NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNSUR PENGUKURAN KINERJA
TARGET : 18,5

INDIKATOR SASARAN :

1. Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEDA; Target : 27
2. Predikat SAKIP BAPPEDA; Target : A
3. Indeks Kualitas Perencanaan; Target : Cukup Baik
4. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD; Target : 73,7
5. Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengembangan. Target : 100%



PROGRAM : 4 PROGRAM
KEGIATAN : 16 KEGIATAN
SUB KEGIATAN : 86 SUB KEGIATAN



CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN TW I TAHUN ANGGARAN 2023

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|---|-------------|---|-------|
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD | Persen | 100 | 662.225.000 | | 262.568.450 | | 39,65 |
| | Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah | Persen | 100 | | | | | |
| | Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD | Persen | 73,7 | | | | | |
| Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pendanaan | Dokumen | 8 | 604.401.000 | - | 212.068.450 | - | 35,09 |
| Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen | 4 | 3.724.000 | - | - | - | - |
| Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | 1 | 54.100.000 | - | 50.500.000 | - | 93,35 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----|---------------|---|-------------|---|-------|
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD | Persen | 100 | 1.242.450.000 | | 272.470.300 | | 21,93 |
| | 1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD | Persen | 100 | | | | | |
| | 1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD | Persen | 100 | | | | | |
| | 2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD | Persen | 100 | | | | | |
| | 2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD | Persen | 100 | | | | | |
| | 2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD | Persen | 100 | | | | | |
| | 3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persen | 100 | | | | | |
| | 3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD | Persen | 100 | | | | | |
| | 3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD | Persen | 100 | | | | | |
| | 4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persen | 70 | | | | | |
| | 4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam | Persen | 70 | | | | | |
| | 4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persen | 70 | | | | | |
| Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Dokumen | 14 | 372.225.000 | - | 67.583.500 | - | 18,16 |
| Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Dokumen | 14 | 358.225.000 | - | 52.660.000 | - | 14,70 |
| Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Dokumen | 14 | 512.000.000 | - | 152.226.800 | - | 29,73 |

CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN TW I TAHUN ANGGARAN 2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|---|------------|---|-------|
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan | Persen | 100% | 200.000.000 | | 11.541.000 | - | 5,77 |
| Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Dokumen | 1 | 60.000.000 | - | 7.164.000 | - | 11,94 |
| Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Dokumen | 1 | 80.000.000 | - | - | - | - |
| Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Dokumen | 1 | 60.000.000 | - | 4.377.000 | - | 7,30 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------|---------------|---|---------------|---|-------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Nilai SAKIP BAPPEDA | Nilai | 86,95 | 6.245.077.403 | | 1.176.697.306 | | 18,84 |
| | Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah | IPKPD | B | | | | | |
| | Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD | Persen | 100 | | | | | |
| | Persentase pemenuhan data kepegawaian | Persen | 100 | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal | Persen | 85 | | | | | |
| | Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah | Persen | 100 | | | | | |
| | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah | Persen | 100 | | | | | |
| | Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik | Persen | 100 | | | | | |
| Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 15 | 101.637.800 | - | 6.010.000 | - | 5,91 |
| Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | 56 | 4.216.457.903 | - | 774.476.052 | - | 18,37 |
| Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | 13.019.000 | - | 450.000 | - | 3,46 |
| Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen | 9 | 82.806.000 | - | 400.000 | - | 0,48 |
| Kegiatan : Administrasi Umum | Jumlah Dokumen administrasi Umum | Dokumen | 8 | 648.782.500 | - | 110.313.700 | - | 17,00 |
| Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 2 | 1.019.161.200 | - | 239.127.554 | - | 23,46 |
| Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 2 | 163.213.000 | - | 45.920.000 | - | 28,14 |

SERAPAN PROGRAM

| No | Program | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|----|--|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rp. 662.225.000 | Rp. 262.658.450 | 39,65% |
| 2 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 1.242.450.000 | Rp. 272.470.300 | 21,93% |
| 3 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp. 200.000.000 | Rp. 11.541.000 | 5,77% |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Rp. 6.245.077.403 | Rp. 1.176.697.306 | 18,84% |

SERAPAN KEGIATAN

| No | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi TW I (Rp) | Persentase % |
|----|--|---------------|---------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan pendanaan | 604.401.000 | 212.068.450 | 35,09 |
| 2 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 3.724.000 | 0 | 0 |
| 3 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah | 54.100.000 | 50.500.000 | 93,35 |
| 4 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pengembangan Manusia | 372.225.000 | 67.583.500 | 18,16 |
| 5 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 358.225.000 | 52.660.000 | 14,70 |
| 6 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 512.000.000 | 152.226.800 | 29,73 |
| 7 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara Pemerintah dan Pengkajian Peraturan | 60.000.000 | 7.164.000 | 11,94 |
| 8 | Penelitian dan Pengembangan Sosial dan kependudukan | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 9 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 60.000.000 | 4.377.000 | 7,30 |

| No | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi TW I (Rp) | Perentase % |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 10 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | 101.637.800 | 6.010.000 | 5,91 |
| 11 | Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.216.457.903 | 774.476.052 | 18,37 |
| 12 | Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 13.019.000 | 450.000 | 3,46 |
| 13 | Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 82.806.000 | 400.000 | 0,48 |
| 14 | Adminitrasi Umum | 648.782.500 | 110.313.700 | 17,00 |
| 15 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.019.161.200 | 239.127.554 | 23,46 |
| 16 | Pemeliharaan barang Milik Daerah | 163.213.000 | 45.920.000 | 28,14 |
| | TOTAL SERAPAN TW I | 8.349.752.403 | 1.723.277.056 | 20,64 |

FAKTOR PENDUKUNG

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
2. Adanya dukungan Penuh dari pimpinan dalam pencapaian target
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman



RENCANA TINDAK LANJUT

1. Lakukan koordinasi penyerapan anggaran;
2. Optimalisasi proses penyerapan;
3. Identifikasi faktor penghambat;
4. Evaluasi hasil pelaksanaan monitoring



TERIMAKASIH !!!





**SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PADA KEGIATAN

**KONSULTASI KABUPATEN UNTUK PROPOSAL GREEN
CLIMATE FUND DAN PENYUSUNAN DOKUMEN
SAFEGUARD**
grin
Klaimet Fan *Sangat.*
**AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI BERBASIS LAHAN
MELALUI PENDEKATAN YURISDIKSI
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PUTUSSIBAU, 29 MEI 2023

**ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,
SHALOM, OM SWASTIASTU,
NAMO BUDDHAYA, SALAM KEBAJIKAN.**

YANG SAYA HORMATI

- KEPALA OPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT ATAU YANG MEWAKILI DALAM HAL INI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN *K.FPH Utara dan Bt - Kallau, Gay - Henrik.*
- KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KEPALA KANTOR LINGKUP PEMKAB KAPUAS HULU ATAU YANG MEWAKILI
- KEPALA BAGIAN EKONOMI KAB. KAPUAS HULU
- KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM ATAU
- KEPALA UPT KPH KAPUAS HULU UTARA, KAPUAS HULU TIMUR DAN KAPUAS HULU SELATAN
- POLITEKNIK PUTUSSIBAU
- FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT SIPIL (FORMASI) KABUPATEN KAPUAS HULU, MITRA PEMBANGUNAN, LEMBAGA PENDAMPING MASYARAKAT DI KAB KAPUAS HULU;
- PERWAKILAN DIREKTUR PERUSAHAAN BIDANG KEHUTANAN, DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KAB. KAPUAS HULU
- SDR. TENAGAAHLI, KONSULTAN YANG MENDAMPINGI PENYUSUNAN DOKUMEN SAFEGUARD KAJIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL SERTA SPESIALIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA MASYARAKAT ADAT

- PESERTA, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS BERKAT RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA DIBERI KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK BERKUMPUL DALAM KEGIATAN BERJUDUL "KONSULTASI PARA PIHAK DI KABUPATEN UNTUK PROPOSAL GREEN CLIMATE FUND DAN DISKUSI PENYUSUNAN DOKUMEN SAFEGUARD DI KABUPATEN KAPUAS HULU".

Sangat baik. Keleluasaan pengantar.
HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,
BEBERAPA MINGGU LALU, BEBERAPA KABUPATEN DI KALIMANTAN BARAT DAN DIANTARANYA KABUPATEN KAPUAS HULU TELAH DIUNDANG PEMERINTAH PROVINSI DALAM PERTEMUAN KONSULTASI PARA PIHAK UNTUK MENGINFORMASIKAN MENGENAI RENCANA DAN UPAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG SEDANG MENYELESAIKAN PROPOSAL PENDANAAN IKLIM KEPADA GREEN CLIMATE FUND.

UPAYA YANG DILAKUKAN PROVINSI INI SEBAGAI WUJUD KOMITMEN PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI SKEMA DAN UNTUK BERKONTRIBUSI MELALUI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERDASARKAN RENCANA YANG DITUANGKAN DALAM DOKUMEN STRATEGI RENCANA

AKSI DIMANA DALAM DOKUMEN TERSEBUT DITARGETKAN PENURUNAN EMISI SEBESAR 60% DARI SKENARIO BISNIS SEPERTI BIASA ATAU *BUSINESS AS-USUAL* (BAU) MELALUI PENDEKATAN PENURUNAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI (REDD+).

SALAH SATU TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI BEBERAPA PROGRAM DAN RENCANA YANG DISUSUN BAIK DI PROVINSI DAN TERMASUK DI TINGKAT KABUPATEN ADALAH TERSEDINYA SUMBER DAYA YANG MAMPU SECARA OPTIMAL MENDUKUNG DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN UNTUK AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SERTA MENJALANKAN PERENCANAAN REDD+ DI TINGKAT KABUPATEN DAN DI TINGKAT MASYARAKAT.

HADIRIN UNDANGAN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,
KAMI INGIN MENYAMPAIKAN BAHWA KABUPATEN KAPUAS HULU JUGA MEMILIKI KOMITMEN YANG KUAT DAN KERJASAMA TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PERBAIKAN TATA KELOLA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DALAM IMPLEMENTASI KONSEP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.

DENGAN SUMBER DAYA ALAM YANG MELIMPAH DAN KEBERADAAN TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM YANG MENJADI WARISAN DUNIA, POTENSI BESAR DAN NILAI STRATEGIS KABUPATEN MAKA DIKEMBANGKAN BEBERAPA INISIATIF LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG DITUJUKAN

UNTUK MELINDUNGI LINGKUNGAN DAN HAK MASYARAKAT MISALNYA DENGAN PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KONSERVASI, KAPUAS HULU SEBAGAI BAGIAN WILAYAH JANTUNG KALIMANTAN (HEART OF BORNEO) DAN BAHKAN DI LEVEL INTERNASIONAL MELALUI UNESCO KABUPATEN KAPUAS HULU TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BIOSFER.

INI MENUNJUKKAN BETAPA STRATEGISNYA KEBERADAAN KAPUAS HULU DALAM ISU KELOLA SUMBER DAYA SECARA BERKELANJUTAN. BELUM LAGI INISIATIF LOKAL YANG DIKEMBANGKAN MISALNYA DANAU LINDUNG, DAN SKEMA PERLINDUNGAN LAINNYA UNTUK PERLINDUNGAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT SEBAGAI SEBUAH AREAL PERLINDUNGAN UNTUK MEMBERIKAN PERIKEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK.

SELAIN ITU KABUPATEN KAPUAS HULU JUGA SECARA AKTIF MENJADI BAGIAN DARI FORUM LINGKAR TEMU KABUPATEN LESTARI, SEBUAH FORUM KOORDINASI KABUPATEN YANG KITA MAKNAI MENDUKUNG DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP PEMBANGUNAN YANG SELARAS DENGAN ALAM DALAM BINGKAI YURISDIKSI LANSEKAP KEWILAYAHAN DIMANA DIKEMBANGKAN PEMBANGUNAN YANG MEMPERHATIKAN DAN MEMADUKAN ASPEK KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA INKLUSIF BAGI SEMUA PIHAK.

HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

JIKA MELIHAT JUDUL PERTEMUAN HARI INI YAITU KONSULTASI KABUPATEN UNTUK PROPOSAL PROGRAM KEGIATAN KEPADA GREEN CLIMATE FUND, MERUPAKAN INISIATIF YANG SANGAT BAIK PROVINSI DAN DENGAN DUKUNGAN KABUPATEN UNTUK MEMBIAYAI RENCANA PEMBANGUNAN YANG DISUSUN DALAM KONTEKS AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM.

KAPUAS HULU MERUPAKAN SALAH SATU DAERAH YANG CUKUP RENTAN BERKENAAN DENGAN ISU DAMPAK PERUBAHAN IKLIM, DAN KITA SEMUA TAHU BEBERAPA WAKTU LALU BEBERAPA TEMPAT SELALU DILANDA BANJIR. PENANGANAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENJADI HAL PENTING TERUTAMA KESIAPAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN-PERUBAHAN LINGKUNGAN YANG TERJADI.

SEKALI LAGI SAYA TEGASKAN DUKUNGAN PENDANAAN UNTUK AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI LINGKUNGAN INI SANGAT PENTING UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN MEMBANGUN MASYARAKAT YANG KUAT DAN ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN YANG TERJADI.

PADA HARI INI SELAIN KONSULTASI KABUPATEN JUGA DILAKUKAN PENYUSUNAN DOKUMEN SAFEGUARD ATAU KERANGKA PENGAMAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL. DOKUMEN INI PENTING UNTUK MEMASTIKAN ADANYA

INTEGRASI DAN SINERGITAS ANTARA PERENCANAAN DALAM PROPOSAL GREEN CLIMATE FUND DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN TERUTAMA DI TINGKAT TINGKAT KABUPATEN, DAN PASTINYA UNTUK MENGIDENTIFIKASI DAN MENGANTISIPASI SECARA DINI POTENSIAL RESIKO NEGATIF YANG MUNGKIN ADA DAN SEKALIGUS MENINGKATKAN DAMPAK POSITIF PROGRAM PADA TAHAPAN IMPLEMENTASI TERUTAMA BAGI MASYARAKAT DAN PARA PIHAK LAIN YANG TERDAMPAK SERTA TERLIBAT DARI PROGRAM INI.

HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

Ami
W/ Kami Upl an
~~MENDENGARKAN~~ INFORMASI AWAL BAHWA PROPOSAL PROGRAM YANG DISUSUN DAN DIKEMBANGKAN SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN MAKA KITA BERHARAP PROGRAM INI DAPAT TERLAKSANA DAN BERJALAN SEHINGGA Mendukung UPAYA DAN PENCAPAIAN TARGET PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SELARAS DALAM NAFAS PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.

PADA KESEMPATAN INI PULA SAYA BERHARAP FORUM-FORUM PARA PIHAK YANG SUDAH ADA SEPERTI FORUM CAGAR BIOSFER DAPAT MENGAMBIL PERAN AKTIF BERKOMUNIKASI UNTUK SECARA DINI MENKOORDINASIKAN PARA PIHAK DAN MENJALANKAN RENCANA FORUM YANG TELAH DISUSUN, SEMOGA

LANGKAH INI MEMPERKUAT INISIATIF YANG SUDAH ADA. DEMIKIAN JUGA DENGAN PARAPIHAK LAINNYA BAIK PEMERINTAH, NON PEMERINTAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA MARI KITA BERSAMA Mendukung PROGRAM INI DAN MEMBANGUN KAPUAS HULU LEBIH BAIK DAN BERKELANJUTAN.

MARI KITA MANFAATKAN PERTEMUAN INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DENGAN MEMBERIKAN MASUKAN, TANGGAPAN DAN KONTRIBUSI YANG KONTRUKTIF

DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN DALAM KESEMPATAN INI.

DENGAN MENGUCAP PUJI SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

"KONSULTASI KABUPATEN PROPOSAL GREEN CLIMATE FUND DAN PENYUSUNAN DOKUMEN SAFEGUARD UNTUK AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI BERBASIS LAHAN MELALUI PENDEKATAN YURISDIKSI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT"

SECARA RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN, SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WABILLAHİ TAUFİK WALHİDAYAH WASSALAMUALAIKUM
WRWB.
SELAMAT PAGI DALAM SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA
SEMUA

KAPUAS HULU, 29 MEI 2023

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730102 199803 1 008